

Analisis Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Utara

Ghefira Nurfatimah¹, Julia Handayani², Indra Fauzi³, Reza Hanafi Lubis⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

E-mail: ghefiranurfatimah780@gmail.com¹, juliahandayani5@gmail.com², fauziindra14@gmail.com³, rezahanafilubis@gmail.com⁴

Article History:

Received: Mar, 2025

Revised: Mar, 2025

Accepted: Mar, 2025

Abstract: Penelitian ini dilakukan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa ada beberapa masalah dengan penerapan Layanan Pekerjaan Aplikasi Sistem (SAPK Online) di kantor tersebut. Masalah-masalah ini terutama berkaitan dengan sumber daya manusia dan teknologi saat ini. Dua tujuan utama penelitian ini adalah untuk menerapkan E-Government melalui Layanan Pekerjaan Aplikasi Sistem (SAPK Online). Tujuan pertama adalah untuk memahami bagaimana E-Government diterapkan melalui SAPK di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Tujuan kedua adalah untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat penerapan E-Government melalui SAPK di instansi tersebut. Studi ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, dan tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan secara rinci bagaimana E-Government diterapkan dalam administrasi kepegawaian melalui SAPK Online, atau Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Untuk menganalisis data, analisis deskriptif kualitatif digunakan, yang bertujuan untuk menggambarkan data yang dikumpulkan secara khusus melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data ini dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan indikator yang telah ditentukan oleh penulis.

Keywords:

Pemerintahan Digital, Sistem SAPK Online, Manajemen Kepegawaian

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin tinggi menyebabkan semakin canggihnya teknologi yang digunakan oleh manusia sehingga hal ini menjadi titik awalnya teknologi menjadi semakin canggih dan mutakhir, seperti adanya internet. Dengan perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat saat ini, para pejabat pemerintah lebih mudah membuat keputusan tentang hal-hal seperti administrasi,

pelayanan, dan pengelolaan data kepegawaian. Pemerintah membutuhkan alat bantu yang dapat diandalkan untuk perencanaan dan pengendalian, seperti sistem manajemen informasi.

E-Government adalah jenis layanan publik yang dimulai dengan informasi dan data berbasis komputer tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan transparansi layanan publik. Ini juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memungkinkan interaksi antara pemerintah dan berbagai pihak, termasuk masyarakat, bisnis, dan lembaga pemerintah. Selain itu, e-Government dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain baik di dalam SKPD maupun di luarnya melalui email, chat, atau telekonferensi. Seiring perkembangannya, implementasi e-Government menjadi tren dalam tata kelola pemerintahan, di mana hampir semua aplikasi yang digunakan melibatkan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Dalam menjalankan tugasnya, para birokrat pemerintah setiap hari dihadapkan pada keputusan penting yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pemerintahan yang bersangkutan.

BBKSDA Sumut Lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengkajian kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam serta manajemen Pegawai Negeri Sipil telah merancang dan mengembangkan situs web www.bbksda.sumut.go.id sebagai bagian dari kebijakan penerapan e-Government.

Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi merupakan kendala utama dalam penerapan kebijakan e-Government melalui SAPK. Dalam beberapa situasi, masalah teknis sederhana, seperti gangguan sistem atau jaringan, masih belum dapat diselesaikan. Selain itu, data rekapitulasi BBKSDA berdasarkan pangkat dan jabatan menunjukkan bahwa jumlah karyawan yang bertanggung jawab atas program SAPK belum mencukupi kebutuhan.

Metode

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian berbasis e-Government di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumut. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mendalam tentang implementasi layanan kepegawaian yang didasarkan pada keadaan di lapangan. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk tabel dan akan disertai dengan penjelasan yang menghubungkan temuan dengan

teori yang relevan. Selain itu, uraian yang diberikan akan mendukung dalam menjawab setiap permasalahan yang diidentifikasi, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh, yang kemudian dirangkum dalam kesimpulan dan rekomendasi.

Hasil

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 20 Tahun 2008 mengatur pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, BKN mengeluarkan Peraturan Kepala Nomor 18 Tahun 2010, yang menetapkan prosedur untuk menetapkan NIP, kenaikan pangkat, pemberhentian, pemberian pensiun, dan perpindahan antarinstansi, semua yang dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pegawai Negeri Sipil (SAPK) Online.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) Nomor 20 Tahun 2008 mengatur pengoperasian aplikasi berbasis web ini secara online. Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2010 mengubah SPAK, sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, menjadi lebih jelas. Peraturan tersebut mengatur berbagai prosedur yang berkaitan dengan pegawai negeri, termasuk penetapan NIP dan prosedur terkait lainnya, menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Online (SAPK Online).

Dukungan merupakan aspek yang tak kalah penting dalam penerapan e-Government, di mana dukungan penuh dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Berbagai elemen pendukung diharapkan dapat memberikan kontribusi yang efektif oleh pemerintah untuk mendukung penerapan e-Government adalah sebagai berikut:

Kesiapan pemerintah dalam implementasi *e-Government*, khususnya di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, masih perlu ditingkatkan. Meskipun situs resmi (www.bbksda.sumut.go.id) telah ada sejak 2008, pengembangan dan pemanfaatannya belum optimal. Perlu peningkatan bertahap yang mempertimbangkan kompleksitas sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi.

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor krusial. Tingkat literasi teknologi informasi yang memadai sangat penting (Indrajit, 2005:9), namun BBKSDA Sumatera Utara saat ini kekurangan SDM yang berkompetensi di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Minimnya fasilitas dan ruang khusus untuk *e-

Government* juga menambah beban kerja dan mempersulit pengelolaan data dan informasi pribadi yang kini terhubung internet. Sosialisasi situs, baik internal maupun eksternal, juga belum dilakukan, padahal akses informasi publik melalui internet semakin mudah.

Terkait alokasi sumber daya, penelitian ini memfokuskan pada ketersediaan SDM, finansial, tenaga, waktu, dan informasi dalam pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Online di BBKSDA Sumatera Utara. Data terkait hal ini diperoleh melalui penelitian dan wawancara dengan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah.

Dalam hal Sumber Daya Manusia, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara memiliki karyawan yang bertugas langsung di berbagai bidang. Karyawan-karyawan ini nantinya akan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Online (SAPK Online) sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Aplikasi ini digunakan oleh 25 pegawai dari berbagai disiplin ilmu.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Online di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara sangat bergantung pada sumber daya keuangan. Agar kebijakan dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti pengadaan perangkat keras, biaya koneksi internet (Wi-Fi dan LAN), dan peningkatan daya listrik, dana awal sangat diperlukan.

Sesuai dengan Keputusan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010, yang mengatur mengenai prosedur penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pemberhentian, pemberian pensiun, serta perpindahan antar instansi dalam kerangka sistem SAPK Online.

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa ketersediaan dasar hukum yang menjadi acuan untuk pengembangan SAPK di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara sudah cukup memadai, berkat adanya berbagai regulasi yang mendukung. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua peraturan tersebut mencantumkan sanksi atau penghargaan, sehingga setiap daerah tidak diwajibkan untuk membangun SAPK; peraturan-peraturan ini sifatnya lebih bersifat anjuran bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum untuk penerapan e-Government melalui SAPK Online telah ditetapkan dengan cukup jelas.

Saat ini, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di BBKSDA Sumut baru digunakan di tingkat pusat, sementara peraturan di tingkat daerah masih belum ada. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2013, yang membahas Kebijakan dan Strategi

Nasional untuk Pembangunan e-Government, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010, yang mengatur prosedur penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pemberhentian, pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, serta perpindahan antar instansi melalui sistem SAPK Online, digunakan dalam pengelolaan SAPK di BBKSDA Sumut. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan penerapan e-Government melalui SAPK di BBKSDA Sumut.

Dalam rangka sosialisasi dan pelatihan mengenai SAPK Online, BBKSDA Sumut telah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama tiga hari. Namun, sosialisasi ini hanya dilakukan sekali. Dalam konteks daya dukung, kapasitas yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SAPK Online. Terdapat tiga elemen penting yang harus dimiliki pemerintah terkait dengan hal ini:

1. Kualitas Sarana Teknologi

Kualitas sarana teknologi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui SAPK Online di BBKSDA Sumut menjadi aspek yang sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana teknologi yang ada di kantor BBKSDA Sumut, seperti jaringan komputer baik Local Area Network (LAN) maupun Wireless Fidelity (WiFi), cukup mendukung penerapan e-Government melalui SAPK Online. Pembangunan fasilitas jaringan ini bertujuan untuk memperlancar distribusi data kepegawaian antar SKPD dan meningkatkan komunikasi antara SKPD dan BKD. Namun, penggunaan fasilitas tersebut belum berjalan secara optimal, karena seringkali terjadi gangguan koneksi yang menghambat proses login. Situasi serupa juga dapat terjadi ketika terjadi pemadaman listrik atau saat arus listrik melemah akibat beban penggunaan komputer yang tinggi, sehingga kecepatan WiFi sering mengalami penurunan.

2. Kesiapan Aparatur

Kesiapan aparatur negara menjadi faktor kunci dalam menerapkan kebijakan e-Government melalui SAPK Online di BBKSDA Sumut. Ketika aparatur dapat menjalankan tugas dengan baik, maka pelayanan publik juga akan meningkat. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan terkait kesiapan pegawai di BKD. Perkembangan teknologi yang pesat mendorong aparatur pemerintah untuk lebih kompeten dalam menggunakan teknologi terkini.

Diskusi

Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online

menawarkan berbagai manfaat dan keunggulan dalam pelayanan terhadap kepegawaian. Salah satu keunggulan tersebut adalah kemudahan dalam mengintegrasikan seluruh proses pelayanan kepegawaian, mulai dari pengajuan instansi hingga penetapan persetujuan dan penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta instansi terkait. SAPK berbasis web ini terhubung dengan berbagai aplikasi lain yang relevan, seperti aplikasi penghubung dengan pemangku kepentingan, pengelolaan dokumen, peningkatan portal BKN, Executive Information System, serta adanya layanan helpdesk.

Selain itu, jika diperlukan penambahan atau pengembangan aplikasi SAPK, perubahan dapat dilakukan dengan mudah di sisi server di BKN Pusat. Pengguna juga dapat dengan mudah mengakses aplikasi ini menggunakan web browser tanpa memerlukan ruang penyimpanan yang besar di perangkat mereka. Aplikasi berbasis web ini bersifat universal, kompatibel dengan berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, dan lainnya. Kemudahan akses SAPK juga memungkinkan pengguna untuk terhubung baik melalui VPN maupun internet.

Kesimpulan

Setelah penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAPK Online di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara telah terlaksana. Namun, pada kenyataannya, sumber daya manusia (SDM) atau pengguna sistem di BBKSDA Sumut belum sepenuhnya mampu memanfaatkan sistem SAPK Online secara optimal.

Daftar Referensi

- _____, 2006, E-Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi, APTIKOM, Yogyakarta
- Budiati Ayuningsih, dkk, 2010. Ilmu Administrasi Negara Kontemporer. Graha Ilmu, Jakarta.
- Furchan, A. 2004, Pengantar penelitian dan Pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indrajit Richardus Eko, 2005, E-Government in action, Andi, Yogyakarta.
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang strategi dan pengembangan E-Government.
- Kadir Abdul, 2002, Pengenalan Sistem Informasi, Andi, Yogyakarta.

KMK.No. 85/RMK.02/2003 tentang modernisasi jangka menengah.

Keputusan MENPAN No. 8 Tahun 1993 tentang segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan BUMN.

Kumorotomo, Wahyudi. 1996. Sistem Informasi Manajemen. Jogjakarta: Gajah Mada University.

Lubis, Hari dan Huseini Martani. 1998. Teori Organisasi, Pusat-pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Univ Indonesia.

Moenir, H AS, Drs, Manajemen Pelayanan Umum Indonesia, Bumi aksara, Jakarta. 2008. [12]. Moekijat. 1991. Pengantar Sistem Informasi Manajemen. Bandung: PT Remaja Rosdakarya [13]. Mulyasa. 2002. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Resdakarya.

Nugroho Eko, 2008, Sistem Informasi Manajemen, Andi, Yogyakarta.

Nugroho, Eko, Dr, Ir, Sistem Informasi Manajemen, Andi Offset, 2008

Patilima, Hamid. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Peraturan BKN No. 2 Tahun 2008 tentang pedoman pemanfaatan SAPK.

Puspita, Denok. 2011. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya". Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran unesa. Vol 3, no. 4 http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpap_rtile/view/54278. Diakses pada 3 Maret 2016.

Saputra, T. (2016). Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (studi kasus kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar). Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 4(2), 89-100.

Siagian, Sondang P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia [19]. Sukmadinata, 2006, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeda, Bandung.

Safroni, M. Ladzi, 2012. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik" dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Aditya Media, Malang.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. Reformasi Pelayanan Publik, teori, kebijakan dan implementasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2006

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Gramedia.